RENCANA KERJA (RENJA)
Tahun 2023

KECAMATAN ANGKONA
KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Angkona dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini disusun sebagai dasar/acuan Pemerintah Kecamatan Angkona dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai indikator terhadap capaian keberhasilan yang telah ditargetkan pada Renstra kurun waktu Lima tahun (2016-2026).

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang tersusun ini masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan ketelitian, kecermatan dan pengkajian yang lebih mendalam karena adanya pengembangan kegiatan organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Angkona yang dapat kami sampaikan dengan harapan adanya saran, petunjuk dan usulan sehingga Renja Tahun 2023 ini representif dan lebih baik.

Angkona, 24 Juli 2022

Camat Angkona,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN ANGKONA

I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP
Pangkat : Penata Tk I
NIP. : 19880221 200701 1 001

DAFTAR ISI

			Hal.
KATA PENGANTAR			2
DAFTAR ISI			3
BAB	I	PENDAHULUAN	4
		1.1. Latar Belakang	4
		1.2. Landasan Hukum	6
		1.3. Maksud dan Tujuan	8
		1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB	II	HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ANGKONA TAHUN LALU	11
		2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Angkona	11
		2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angkona	19
		2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Angkona	22
		2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
		2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB	III	TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	31
		3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
		3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Angkona	31
		3.3. Program dan Kegiatan	33
BAB	IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ANGKONA	38
BAB	V	PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good govermance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang lebih baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good Governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas*, *transparansi, rule of law, profesionalisme, efektivitas* dan *efesiensi.*

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2), dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan jangka pendek atau tahunan (1 tahun).

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) bahwa :

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab Camat dalam mengemban tugasnya.

Seorang Camat disamping melaksanakan tugas dari Bupati/Walikota, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleknya tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik

di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaanpembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai apliksi dari uraian di atas maka telah disusun suatu Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Angkona Tahun 2021 – 2026 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Luwu Timur yaitu Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budayadi Kecamatan Angkona.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kacamatan Angkona untuk rentang waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan hukum Kantor Camat Angkona Kabupaten Luwu Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21,Tambahaan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahserta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahsebagaimana telah di ubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangpelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu TimurTahun 2016 nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 4);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, SertaTata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Angkona tahun 2023 adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada periode tahunan dan memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Angkona guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Angkona tahun 2023 adalah :

1. Sebagai acuan dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Sebagai suatu dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam penganggaran
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu Timur khususnya Kecamatan Angkona;
4. Merupakan landasan kebijakan dari program strategi serta menjadi skala prioritas pembangunan Kecamatan yang akan dikategorikan kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan AngkonaT.A 2023;
5. Sebagai landasan bagi Camat dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan serta pelaksanaan program kerja Camat ;
6. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Angkona dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Angkona Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ANGKONA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Angkona
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angkona
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Angkona
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Angkona
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V P E N U T U P

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN ANGKONA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Angkona

Secara umum Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Angkona tahun 2021 dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja SKPD. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gad*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Berkaitan dengan pelaksanaan Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Angkona wajib melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD berdasarkan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran **Tahun 2021** dan evaluasinya dapat dilihat di bawah ini :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pad SKPD
4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
   - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   - Fasilitasi Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   - Pengadaan Mebel
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pengadaan Sarana dan Prasaranana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan pelaksanaan UrusPemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

D. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum

1. Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal diwilayah Kecamatan

- Harmonisasi hubungan dengan toko agama dan tokoh masyarakat

2. Kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

- Koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Dikecamatan

F. Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa

1. Kegiatan fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

- Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya
- Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan

Untuk lebih jelasnya tentang Evaluasi Hasil Renja dan Evaluasi terhadap Hasil Renstra SKPD Kecamatan Angkona **Tahun 2021** dapat dilihat di Tabel.01 berikut ini :

Tabel. 01

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

DAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN ANGKONA TAHUN 2020

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2020 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		-															
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi ((%))**	**100**	**532.479.898**									-	**358.225.812**	**0,00%**	**67,27%**
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagendakan (Surat)	800	2.795.000	272	363.000	171	408.000	229	768.000	224	1.237.000	896	2.776.000	112,00%	99,32%
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan (Rekening)	96	46.800.000	24	11.377.001	22	11.274.985	22	10.541.300	26	12.033.626	94	45.226.912	97,92%	96,64%
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa (Jenis)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan	2	30.438.600	2	5.396.500	2	7.651.500	2	7.129.500	2	10.186.000	2	30.363.500	100,00%	99,75%
		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (Unit)	18	10.100.000	4	3.950.000	8	1.300.000	2	1.900.000	4	2.925.000	18	10.075.000	100,00%	99,75%
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	495	12.685.500	176	3.656.200	139	3.065.200	124	2.361.200	175	3.580.200	614	12.662.800	124,04%	99,82%
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	15015	12.900.000	4.302	3.350.000	3.027	3.333.000	3.014	3.023.000	3.804	2.960.000	14.147	12.666.000	94,22%	98,19%
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	10	3.616.000	2	1.060.000	6	844.000	3	760.000	3	925.000	14	3.589.000	140,00%	99,25%

		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Eksemplar)	60	7.920.000	15	1.980.000	15	1.980.000	15	1.980.000	15	1.980.000	60	7.920.000	100,00%	100,00%
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	2	1.752.000	2	397.000	2	597.000	2	78.500	2	635.500	2	1.708.000	100,00%	97,49%
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan (Kotak)	2821	74.985.000	795	15.999.000	528	11.798.000	365	10.133.000	893	36.952.000	2.581	74.882.000	91,49%	99,86%
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan (Kali)	6	27.420.000	2	10.630.000	-	-	1	2.231.000	3	14.531.550	6	27.392.550	100,00%	99,90%
		Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan	4	54.000.000	4	9.000.000	4	13.500.000	4	13.500.000	4	18.000.000	4	54.000.000	100,00%	100,00%
		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan	460	74.965.000	118	28.718.900	117	11.168.500	145	12.364.750	53	22.711.900	433	74.964.050	94,13%	100,00%
					360.377.100										**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**	97,87%	99,40%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Terpenuhi ((%))**	**100**	**312.009.172**									-	**59.961.280**	**0,00%**	**19,22%**
		Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan (Unit)	3	2.450.000	3	2.450.000	-	-	-	-	-	-	3	2.450.000	100,00%	100,00%
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (Meter)	72	18.000.000	-	-	72	18.000.000	-	-	-	-	72	18.000.000	100,00%	100,00%
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara (Unit)	1	9.800.000	1	9.800.000	-	-	-	-	-	-	1	9.800.000	100,00%	100,00%
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (Unit)	1	9.989.880	-	-	1	9.988.500	-	-	-	-	1	9.988.500	100,00%	99,99%

		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara (Unit)	6	20.250.000	6	5.560.000	6	2.682.500	6	5.085.350	6	5.044.930	6	18.372.780	100,00%	90,73%
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan yang dipelihara (Unit)	4	1.350.000	3	450.000	3	450.000	-	-	2	450.000	8	1.350.000	200,00%	100,00%
					61.839.880										**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**	102,18%	96,96%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase aparatur Yang di tingkatkan Kapasitasnya (%)**	**95**	**15.000.000**									-	-	**0,00%**	**0,00%**
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek, diklat, workshop, seminar perundang-undangan (Orang)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
					-										**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**	0,00%	0,00%
															Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang dirsusun Tepat Waktu ((%))**	**100**	**3.840.620**									-	**1.717.100**	**0,00%**	**44,71%**
		Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun (Dokumen)	1	1.738.000	1	1.090.500	-	626.600	-	-	-	-	1	1.717.100	100,00%	98,80%
					1.738.000										**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**	100,00%	98,80%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	**Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD**	**Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**	**100**	**8.559.350**									-	**5.216.000**	**0,00%**	**60,94%**

		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Dokumen)	7	5.254.000	3	523.500	1	993.000	2	1.243.000	1	2.456.500	7	5.216.000	100,00%	99,28%
					5.254.000										**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**	100,00%	99,28%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Fungsi Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan/Fungsi Penunjang															
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	**Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa ((%))**	**95**	**95.823.510**									-	**47.368.600**	**0,00%**	**49,43%**
		Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Rasio persentase keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan Musrenbang kecamatan (Rasio)	0,4	10.705.200	0	10.696.700	-	-	-	-	-	-	0	10.696.700	105,00%	99,92%
		Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Cakupan desa yang terfasilitasi Rancangan Perdes APBDes nya (%)	100	13.370.200	100	5.009.100	100	4.127.000	100	1.457.000	100	2.761.000	100	13.354.100	100,00%	99,88%
		Fasilitasi Peran Serta Perempuan dalam Membangun Masyarakat Desa	Persentase PKK desa yang dibina (%)	100	23.402.200	100	4.520.000	100	930.000	100	13.704.800	100	4.163.000	100	23.317.800	100,00%	99,64%
					47.477.600										**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**	101,13%	99,77%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	**Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan**	**Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung**	**95**	**71.169.164**									-	**23.945.100**	**0,00%**	**33,65%**
		Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti (%)	100	10.153.200	100	6.285.100	-	3.035.100	-	285.100	-	297.100	100	9.902.400	100,00%	97,53%

		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun (Dokumen)	4	14.142.700	1	1.385.900	1	10.135.900	1	275.900	1	2.245.000	4	14.042.700	100,00%	99,29%
					24.295.900										**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**	100,00%	98,56%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	**Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban**	**Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban ((%))**	**95**	**11.027.400**									-	**2.708.700**	**0,00%**	**24,56%**
		Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti (%)	100	2.908.700	100	140.000	100	-	100	1.513.800	100	1.054.900	100	2.708.700	100,00%	93,12%
					2.908.700										**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**	100,00%	93,12%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Berkembangnya Sistem Inovasi Daerah dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	**Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum**	**Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum ((%))**	**95**	**59.456.000**									-	**9.071.000**	**0,00%**	**15,26%**
		Pelayanan Administrasi Perizinan	Jumlah administrasi perizinan yang diterbitkan (Izin)	55	9.126.200	15	1.365.500	17	2.831.500	14	2.678.700	5	2.195.300	51	9.071.000	92,73%	99,40%
					9.126.200										**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**	92,73%	99,40%
															Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
					513.017.380	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**98,74%**	**99,06%**
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Angkona

Kantor Camat Angkona yang dipimpin oleh seorang Camat merupakan perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan.Profesionalisme pegawai dalam pelaksanaan tugasnya sangat diharapkan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama kondisi masyarakat dewasa ini yang cukup kritis dan menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, efektif, efisien, transparansi dan akuntabel.

Akan tetapi daya dukung berupa sumber daya manusia secara kualitas masih belum memadai sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang optimal kurang terakomodasi dengan baik. Namun dengan keterbatasan yang ada Camat Angkona beserta stafnya sebagai bagian dari aparatur pemerintah Kabupaten Luwu Timur berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam pelaksanaan tugasnya di masyarakat.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Angkona meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depanorganisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi dan pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Angkona Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2016-2021, yaitu :

a. Persentase Capaian Kinerja peningkatan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik.

   Untuk mencapai kinerja pelayanan Kecamatan mendukung Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik ada 1 (satu) kegiatan yang mendukung yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat. Dari kegiatan tersebut rata-rata pencapaian kinerjanya sebesar 107,27%.

b. Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

   Untuk mencapai kinerja pelayanan kecamatan mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan ada 1 (satu) kegiatan yang mendukung yaitu Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa. Dari kegiatan tersebut rata-rata pencapaian kinerjanya sebesar 100%.

c. Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

   Untuk mencapai kinerja pelayanan kecamatan Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ada 1 (satu) kegiatan yang mendukung yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Dari kegiatan tersebut pencapaian kinerjanya sebesar 94,75%.

d. Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Berjalan Sesuai Standar Dan Ketentuan Perundangan Yang Berlaku.

   Untuk mencapai kinerja Pelayanan kecamatan mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Berjalan Sesuai Standar Dan Ketentuan Perundangan Yang Berlaku ada 1 (satu) kegiatan yang mendukung yaitu Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa. Dari kegiatan tersebut pencapaian kinerjanya sebesar 95,67%.

   Untuk lebih jelasnya terkait persentase pencapaian kinerja pelayanan publik Kecamatan Angkona lihat Tabel.02 pada lampiran berikut ini :

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN ANGKONA TAHUN 2021
KABUPATEN LUWU TIMUR

KANTOR KECAMATAN ANGKONA

NO	INDIKATOR	Target Renstra Perangkat Daerah					Capaian Kinerja				Proyeksi	Catatan Analisis
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10	11
1	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa	95%	95%	100%	100%	100%	100%	97,33%	95,36%	100%	107,27%	
2	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pemerintahan	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	95,13%	100%	100%	
3	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman dan Ketertiban	95%	95%	100%	100%	100%	100%	97,50%	93,75%	100%	94,75%	
4	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan Umum	-	-	100%	100%	100%	-	-	110,91 %	92,73%	95,67%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Angkona

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Angkona, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Luwu Timur kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Luwu Timur;

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya program-program pemerintah yang berbasis pada kebutuhan dasar masyarakat;

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan kualitas dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

5) Arah Kebijakan dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kecamatan Angkonatentang pengembangan wilayah bersama sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis dan memiliki potensi pertanian dan perikanan yang layak untuk terus dikembangkan, maka Kecamatan Angkona harus betul-betul memanfaatkan posisi dan potensi yang dimiliki, guna mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan Renja dengan kebutuhan tahun 2023. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja Kantor Camat Angkona Tahun 2023 disajikan dalam Tabel..03 pada lampiran.

Tabel. 03

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR

SKPD : KANTOR KECAMATAN ANGKONA

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.0.00)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.0,00)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KANTOR CAMAT ANGKONA**	**PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI KECAMATAN (%)**	**100**	**3.104.921.557**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**KANTOR CAMAT ANGKONA**	**PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DI KECAMATAN (%)**	**100**	**2.561.157.709**	
I	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kan. Camat Angkona**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (%)**	**100**	**29.540.000**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kan. Camat Angkona**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja (%)**	**100**	**27.524.887**	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kan. Camat Angkona	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	3	3.690.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kan. Camat Angkona	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (dokumen)	3	12.135.515	
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kan. Camat Angkona	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	6.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kan. Camat Angkona	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	5.704.996	
03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kan. Camat Angkona	Jumlah DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	3.150.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kan. Camat Angkona	Jumlah DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2	2.667.311	
04	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kan. Camat Angkona	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	7	16.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kan. Camat Angkona	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	10	7.017.065	
II	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kan. Camat Angkona**	**Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (%)**	**100**	**2.316.729.847**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kan. Camat Angkona**	**Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (%)**	**100**	**2.019.590.468**	
05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kan. Camat Angkona	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	20	2.275.461.022	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kan. Camat Angkona	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (orang)	19	1.984.068.228	
06	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kan. Camat Angkona	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	18	41.268.825	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kan. Camat Angkona	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	18	35.522.240	

III	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kan. Camat Angkona**	**Persentase pelaporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (%)**	**100**	**13.292.940**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kan. Camat Angkona**	**Persentase pelaporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (%)**	**100**	**13.219.140**	
07	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kan. Camat Angkona	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	12	13.292.940	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kan. Camat Angkona	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	4	13.219.140	
IV	**Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Kan. Camat Angkona**	**Persentase pelaporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (%)**	**100**	**39.592.940**	**Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Kan. Camat Angkona**	**Persentase pelaporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan (%)**	**100**	**34.155.955**	
08	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kan. Camat Angkona	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	12	39.592.940	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kan. Camat Angkona	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	4	34.155.955	
V	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kan. Camat Angkona**	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (%)**	**100**	**50.300.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kan. Camat Angkona**	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (%)**	**100**	**39.382.884**	
09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kan. Camat Angkona	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	30	18.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kan. Camat Angkona	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	1	6.480.000	
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kan. Camat Angkona	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	4	3.300.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kan. Camat Angkona	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (dokumen)	4	3.282.884	
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kan. Camat Angkona	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	5	29.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kan. Camat Angkona	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (orang)	4	29.620.000	
VI	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kan. Camat Angkona**	**Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi (%)**	**100**	**364.803.400**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kan. Camat Angkona**	**Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi (%)**	**100**	**247.201.400**	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kan. Camat Angkona	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	9	6.761.350	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Kan. Camat Angkona	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	9	5.776.350	
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kan. Camat Angkona	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	28	13.487.050	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kan. Camat Angkona	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	28	10.505.050	
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kan. Camat Angkona	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	5	15.860.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kan. Camat Angkona	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	5	13.725.000	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kan. Camat Angkona	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar)	60	7.590.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kan. Camat Angkona	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (eksemplar)	60	7.140.000	
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kan. Camat Angkona	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	2000	102.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kan. Camat Angkona	Jumlah tamu yang difasilitasi (orang)	1900	85.500.000	

17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kan. Camat Angkona	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan (kali)	600	218.605.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kan. Camat Angkona	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaksanakan (kali)	535	124.555.000	
VII	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Angkona**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan**	**100**	**64.343.350**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Angkona**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan**	**100**	**38.500.000**	
18	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kan. Camat Angkona	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan (unit)	1	30.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kan. Camat Angkona	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan (unit)	1	25.500.000	
19	Pengadaan Mebel	Kan. Camat Angkona	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	2	10.000.000	Pengadaan Mebel	Kan. Camat Angkona	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	-	-	
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kan. Camat Angkona	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (unit)	4	24.343.350	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kan. Camat Angkona	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (unit)	3	13.000.000	
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kan. Camat Angkona	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (unit)	0	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kan. Camat Angkona	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (unit)	-	-	
VIII	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kan. Camat Angkona**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang yang terpenuhi (%)**	**100**	**147.559.080**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kan. Camat Angkona**	**Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang yang terpenuhi (%)**	**100**	**102.542.975**	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kan. Camat Angkona	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan (surat)	1000	24.361.200	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kan. Camat Angkona	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan (surat)	900	14.922.175	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kan. Camat Angkona	Jumlah rekening layanan internet, air dan listrik yang terbayarkan (rekening)	96	51.722.880	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kan. Camat Angkona	Jumlah rekening layanan internet, air dan listrik yang terbayarkan (rekening)	96	29.020.800	
24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kan. Camat Angkona	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa (jenis)	2	4.725.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kan. Camat Angkona	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa (jenis)	2	3.850.000	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kan. Camat Angkona	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan (orang)	5	66.750.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kan. Camat Angkona	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang terbayarkan (orang)	2	54.750.000	
IX	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kan. Camat Angkona**	**Persentase BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**100**	**78.760.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kan. Camat Angkona**	**Persentase BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**100**	**39.040.000**	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kan. Camat Angkona	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	3	25.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kan. Camat Angkona	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	3	16.500.000	
27	Pemeliharaan Mebel	Kan. Camat Angkona	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	2	1.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kan. Camat Angkona	Jumlah mebel yang dipelihara (unit)	-	-	

28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kan. Camat Angkona	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	23	22.160.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kan. Camat Angkona	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	20	11.840.000	
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kan. Camat Angkona	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kan. Camat Angkona	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	10.700.000	
30	Pemeliharaa/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kan. Camat Angkona	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	2	10.000.000	Pemeliharaa/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kan. Camat Angkona	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	-	-	
B	**PROGAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kan. Camat Angkona**	**PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN (%)**	**100**	**53.500.000**	**PROGAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kan. Camat Angkona**	**PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN (%)**	**100**	**12.275.585**	
X	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	Kan. Camat Angkona	**Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat yang dilaksanakan (%)**	**100**	**53.500.000**	**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**	Kan. Camat Angkona	**Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat yang dilaksanakan (%)**	**100**	**12.275.585**	
31	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	**KANTOR CAMAT ANGKONA**	Jumlah volume sampah yang terangkut (ton)	2000	40.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	**KANTOR CAMAT ANGKONA**	Jumlah volume sampah yang terangkut (ton)	0	-	
32	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	**Kan. Camat Angkona**	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarka (lembar)	57	13.500.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	**Kan. Camat Angkona**	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarka (lembar)	55	12.275.585	
C	**PROGAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kan. Camat Angkona	**PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG DILAKSANAKAN**	**100**	**70.887.704**	**PROGAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kan. Camat Angkona	**PERSENTASE CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG DILAKSANAKAN**	**100**	**64.753.724**	
XI	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kan. Camat Angkona	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**100**	**70.887.704**	**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kan. Camat Angkona	**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**	**100**	**64.753.724**	
33	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**KANTOR CAMAT ANGKONA**	Angka partisipasi perempuan dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	30	11.742.704	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**KANTOR CAMAT ANGKONA**	Angka partisipasi perempuan dalam forum Musrenbang Kecamatan (%)	30	10.608.023	
34	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kan. Camat Angkona**	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (orang)	70	59.145.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**Kan. Camat Angkona**	Jumlah kader PKK Desa yang diberdayakan (orang)	70	54.145.701	
D	**PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kan. Camat Angkona	**PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100**	**36.250.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kan. Camat Angkona	**PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**100**	**14.917.850**	

XII	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kan. Camat Angkona	**Persentase upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselenggarakan**	**100**	**21.250.000**	**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kan. Camat Angkona	**Persentase upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselenggarakan**	**100**	**10.110.271**	
35	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**Kan. Camat Angkona**	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan (%)	100	11.250.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**Kan. Camat Angkona**	Persentase kasus ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan (%)	100	6.577.691	
36	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kan. Camat Angkona	Jumlah rapat upaya pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kali)	4	10.000.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kan. Camat Angkona	Jumlah rapat upaya pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kali)	12	3.532.580	
XIII	**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**KANTOR CAMAT ANGKONA**	**Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada**	**100**	**15.000.000**	**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**KANTOR CAMAT ANGKONA**	**Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada**	**100**	**4.807.579**	
37	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	**Kan. Camat Angkona**	Jumlah koordinasi/sinergi dengan Polri dan atau perangkat daerah yang tupoksinya di bidang penegakan peraturan perundanga-undangan (kali)	4	15.000.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	**Kan. Camat Angkona**	Jumlah koordinasi/sinergi dengan Polri dan atau perangkat daerah yang tupoksinya di bidang penegakan peraturan perundanga-undangan (kali)	12	4.807.579	
E	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kan. Camat Angkona	**PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**	**100**	**34.805.848**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kan. Camat Angkona	**PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN**	**100**	**14.682.162**	
XIV	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**KANTOR CAMAT ANGKONA**	**Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan**	**100**	**34.805.848**	**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**KANTOR CAMAT ANGKONA**	**Persentase urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan**	**100**	**14.682.162**	
38	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**Kan. Camat Angkona**	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	34.805.848	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**Kan. Camat Angkona**	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100	14.682.162	
F	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kan. Camat Angkona	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU (%)**	**100**	**45.464.715**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kan. Camat Angkona	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERJALAN SESUAI STANDAR DAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU (%)**	**100**	**14.396.870**	
XV	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kan. Camat Angkona	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan (%)**	**100**	**45.464.715**	**Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kan. Camat Angkona	**Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan (%)**	**100**	**14.396.870**	

39	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kan. Camat Angkona	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Difasilitasi Penyusunannya (dokumen)	20	18.188.188	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kan. Camat Angkona	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang Difasilitasi Penyusunannya (dokumen)	20	10.012.789	
40	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kan. Camat Angkona	Persentase desa yang tertib administrasinya (%)	100	19.277.297	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kan. Camat Angkona	Persentase desa yang tertib administrasinya (%)	-	-	
41	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kan. Camat Angkona	Jumlah desa yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (desa)	10	7.999.230	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kan. Camat Angkona	Jumlah desa yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya (desa)	10	4.384.081	
JUMLAH RENCANA ANGGARAN					**3.345.829.824**				**JUMLAH RENCANA ANGGARAN**	**2.682.183.900**	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Angkona pada tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan;
3. Pemberian fasilitasi dan pendampingan terhadap aparat desa dalam menyusun anggaran desa;
4. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
5. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan;
6. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.
7. Pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat.
8. Mendorong kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi.

Sinkronisasi program prioritas Kecamatan Angkona yang telah ditetapkan dan dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui tahapan berikut :

- Kebijakan umum setiap agenda pokok pembangunan dijabarkan oleh Tim Perencanaan Daerah (Bapelitbangda) yang kemudian oleh Kecamatan Angkona dan diperjelas dalam bentuk program prioritas dengan indikator keluaran / sasaran yang jelas.
- Penyusunan rumusan program dan kegiatan Program prioritas pada Kecamatan Angkona di asistensi oleh tim anggaran pemerintah daerah yang terdiri dari Bapelitbangda dan BPKD, untuk selanjutnya didiskusikan apakah kegiatan yang diusulkan itu relevan dengan keadaan sekarang/satu tahun kedepannya.
- Hasil dari rumusan tim TAPD ini selanjutnya di bahas di DPRD dengan agenda pembahasan anggaran kecamatan untuk selanjutnya disahkan untuk menjadi bahan dalam menyusun RKPD Tahun berikutnya.
- Program prioritas dan pagu indikatif hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan kemudian akan dibahas dalam Musrenbang tingkat Kabupaten.
- Hasil Musrenbang Kabupaten akan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Kendala yang sering ditemui pada Musrenbang tingkat Kecamatan yaitu usulan-usulan yang diajukan terlalu mikro dan lebih dominan pada pembangunan fisik. Disamping itu sering ditemui dari sekian banyak masyarakat yang diundang dalam sebuah forum yang mengutarakan pendapat hanya segelintir orang.

BAB III

TUJUAN,SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kinerja Pelayanan Kantor Camat Angkona secara teknis mengacu pada kebijakan Pembangunan Nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik daerah yaitu pada :

a. Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional butir ke 7 yaitu : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dengan program prioritas adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

b. Prioritas RKP Provinsi yaitu Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

3.2.Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Angkona

Penetapan tujuan dan sasaran SKPD pada umumnya didasari oleh faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar SKPD yang bersangkutan mampu mencapai tujuan dan sasarannya, sehingga tidak ada suatu sasaran ataupun aktifitas yang tidak tercapai, karena dengan memperhatikan faktor-faktor kunci keberhasilan berarti SKPD tersebut mengetahui kelebihan atau kekuatannya untuk melaksanakan suatu sasaran dan aktifitasnya.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif namun harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu SKPD atau instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat dicapai serta berorientasi pada hasil.

Adapun tujuan Rencana Kerja Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur yang telah diterapkan adalah sebagai berikut :

1. *Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kecamatan Angkona.*
2. *Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona*;

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu perhatian akan 2 hal pokok yang menjadi komponen tujuan tersebut, yakni :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas baik sarana prasarana maupun sumberdaya aparatur yang merupakan pelaksana pelayanan publik,
2. Peningkatan program dan kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Penjabaran tujuan selanjutnya dituangkan dalam bentuk sasaran. Sasaran adalah penjelasan dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

Sebagaimana yang terdapat pada Renstra Kecamatan Angkona Tahun 2021-2026, sasaran yang ingin dicapai dalam rangka pencapaian tujuan Renja Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona;
2. Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona.

Tujuan dan sasaran Renja Kantor Camat Angkona Tahun 2023 disajikan dalam lampiran Tabel. 04.

TABEL. 04

TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN ANGKONA TAHUN 20223

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kecamatan Angkona	Nilai Lakip	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten di Kecamatan Angkona	100%
2	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona	Tingkat Pertumbuhan IKM	Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,47%

3.3. Program Dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan target sasaran Renja Kantor Camat Angkona Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023, maka akan dilaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan :

a. Sasaran 1 :

Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona :

Didukung oleh 1 program, dengan 9 kegiatan dan 30 sub kegiatan, yaitu :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

I Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

03 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

04 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

II Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

05 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

06 Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

III Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

07 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

IV Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

08 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

V Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

09 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya

10 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

VI Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor

13 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

14 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

16 Fasilitasi Kunjungan Tamu

17 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

VII Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

18 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

19 Pengadaan Mebel

20 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

VIII Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

22 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

23 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

24 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

IX Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

27 Pemeliharaan Mebel

28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

30 Pemeliharaa/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Sasaran 2 :

Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Angkona :

Terdiri dari 5 program, dengan 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan, yaitu :

B PROGAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

X Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

31 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

32 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

C PROGAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

XI Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

33 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

34 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

D PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

XII Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

35 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

36 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

XIII Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

37 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

E PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

XIV Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

38 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

F PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

XV Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

39 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

40 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

41 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN ANGKONA

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Visi Jangka Menengah Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) berpodoman pada Renstra Kecamatan Angkona Kabupeten Luwu Timur dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, namun merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Kecamtan Angkona merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Angkona. Keduanya merupakan penjabaran dari undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas pereturan menteri dalam negeri Nomor 23 Tahun 2007tentang podoman tata cara pengawasan penyelenggaran pemerintah daerah.

Dengan demikian Alokasi Program dan kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2023 serta prakiraan maju Tahun 2024 Kantor Camat Angkona Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dalam Tabel. 05 pada lampiran.

TABEL 05

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN ANGKONA TAHUN 2023
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN LUWU TIMUR

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Tahun 2024
			Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Pagu Indikatif (Rp.)
UNSUR KEWILAYAHAN					
KECAMATAN				3.345.829.824	3.676.317.766
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			3.104.921.557	3.422.233.207
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			29.540.000	30.970.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	3 Dokumen	3.690.000	3.870.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	6.200.000	6.350.000
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	3.150.000	3.250.000
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	7 Dokumen	16.500.000	17.500.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.316.729.847	2.515.529.847
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	20 Orang	2.275.461.022	2.473.261.022
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dokumen	41.268.825	42.268.825
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			13.292.940	14.292.940
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	13.292.940	14.292.940
IV	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			39.592.940	44.892.940

8	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu	12 Dokumen	39.592.940	44.892.940
V	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**50.300.000**	**58.000.000**
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	30 Paket	18.000.000	18.500.000
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	4 Dokumen	3.300.000	3.500.000
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	29.000.000	36.000.000
VI	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**364.803.400**	**377.553.400**
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9 Jenis	6.761.350	7.761.350
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	28 Jenis	13.487.050	14.487.050
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis	15.860.000	16.360.000
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Eksemplar	7.590.000	7.590.000
16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	2000 Orang	102.500.000	112.750.000
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	600 Kali	218.605.000	218.605.000
VII	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			**64.343.350**	**128.500.000**
18	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 Unit	30.000.000	60.000.000
19	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	2 Unit	10.000.000	10.000.000
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan	4 Unit	24.343.350	30.000.000
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0	-	28.500.000
VIII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**147.559.080**	**162.834.080**

22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadministrasikan	1000 Surat	24.361.200	24.361.200
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon/internet, listrik dan air yang terbayarkan	96 Rekening	51.722.880	51.722.880
24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	2 Jenis	4.725.000	5.000.000
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan yang terbayarkan	5 Orang	66.750.000	81.750.000
IX	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			**78.760.000**	**89.660.000**
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	25.600.000	27.400.000
27	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	1.000.000	1.500.000
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	23 Unit	22.160.000	23.760.000
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	20.000.000	25.000.000
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	10.000.000	12.000.000
B	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**53.500.000**	**56.000.000**
X	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**			**53.500.000**	**56.000.000**
31	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah administrasi perizinan yang diterbitkan	57 ton	13.500.000	14.000.000
32	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah volume sampah yang terangkut	2000 Lembar	40.000.000	42.000.000
C	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**70.887.704**	**75.971.586**
XI	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**			**70.887.704**	**75.971.586**
33	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Angka partisipasi perempuan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	30 %	11.742.704	12.094.986
34	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK Desa yang diberdayakan	70 Orang	59.145.000	63.876.600

D	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**36.250.000**	**38.525.000**
XII	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**			**21.250.000**	**22.925.000**
35	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase upaya penyelesaian kasus pelanggaran keamanan dan ketertiban serta persoalan sosial yang fasilitasi	100 %	11.250.000	11.925.000
36	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran keenteraman dan ketertiban yang dilaksanakan	4 Kali	10.000.000	11.000.000
XIII	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**			**15.000.000**	**15.600.000**
37	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi/sinergitas dengan Polri dan atau Perangkat Daerah bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	4 kali	15.000.000	15.600.000
E	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**34.805.848**	**35.850.024**
XIV	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**			**34.805.848**	**35.850.024**
38	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti	100 %	34.805.848	35.850.024
F	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**45.464.715**	**47.737.949**
XV	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**			**45.464.715**	**47.737.949**
39	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Peraturan Desa dan/atau Kepala Desa yang difasilitasi penyusunannya	20 Dokumen	18.188.188	19.097.598
40	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa yang tertib administrasinya	100 %	19.277.297	20.241.161
41	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa yang terpantau perencanaan dan pelaksanaan programnya	10 Desa	7.999.230	8.399.190
				3.345.829.824	**3.676.317.766**

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Angkona dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Luwu Timur di Kecamatan Angkona

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Angkona. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Angkona ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis Kec. Angkona Tahun 2021-2026, maka dilaksanakan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Isi dari Renja Kecamatan Angkona pada intinya merupakan uraian proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan AngkonaKabupaten Luwu Timur secara optimal, juga mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Demikian Dokumen Rencana kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam menentukan arah pelaksanaan kinerja SKPD khususnya Kantor Camat Angkona untuk tahun 2023 dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dari kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Camat Angkona untuk Tahun 2023 sangat tergantung pada kinerja seluruh aparatur yang berada di bawah lingkup pemerintahan Kecamatan Angkona serta dukungan penuh dari masyarakat, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait di wilayah Kecamatan Angkona.

Dengan mengharap keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai visi dan misiKabupaten Luwu Timur kedepannya, Amin.

Angkona, 24 Juli 2022

Camat Angkona,

I KETUT RIAWAN BUDIARTA, S.IP
Pangkat : Penata Tk I
NIP. : 19880221 200701 1 001